



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur subkegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada keputusan menteri tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menindaklanjuti penambahan kegiatan baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun untuk menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan nomenklatur subkegiatan pada RKPD Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renstra Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

14. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renstra Satuan Polisi dan Pamong Praja;
 19. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
dan
 20. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renstra Badan Daerah terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renstra Kapanewon terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renstra Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renstra Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renstra Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renstra Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renstra Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renstra Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renstra Kapanewon Sewon;
 16. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan; dan
 17. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-
2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dengan kewajiban pemerintah untuk mendanai. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Pendidikan Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, terjangkau dan terdesentralisasi melalui pendidikan formal, non formal dan informal. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bantul menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis setiap lima tahun sekali. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen Perubahan

Renstra Perangkat Daerah juga memuat perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati No 158 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyusun Perubahan Renstra dengan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2026 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2021-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030, Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY Tahun 2022-2026 dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2026.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 meliputi:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan;
- c. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- d. Penetapan.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
- 18) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73); dan
- 19) Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kelautan dan Perikanan

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dibentuk pada Tahun 2009. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka Dinas Kelautan dan Perikanan digabung kedalam Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, menjadi Bidang Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul kembali membentuk Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan kegiatannya berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 171 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Perubahan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 merupakan perwujudan dari perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Selain itu penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan juga mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Berdasarkan Pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dibagi menjadi 6 tahapan, antara lain:

1. Persiapan penyusunan,
2. Penyusunan rancangan,
3. Perumusan rancangan akhir dan
4. Penetapan.

Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan operasional tahunan yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

- Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 6. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 931);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);
 14. Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 171);
 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 116).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun ke depan.

- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
- c. Menjadi instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- f. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ;
- g. Pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- i. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi perizinan/ non perizinan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten;
- j. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;

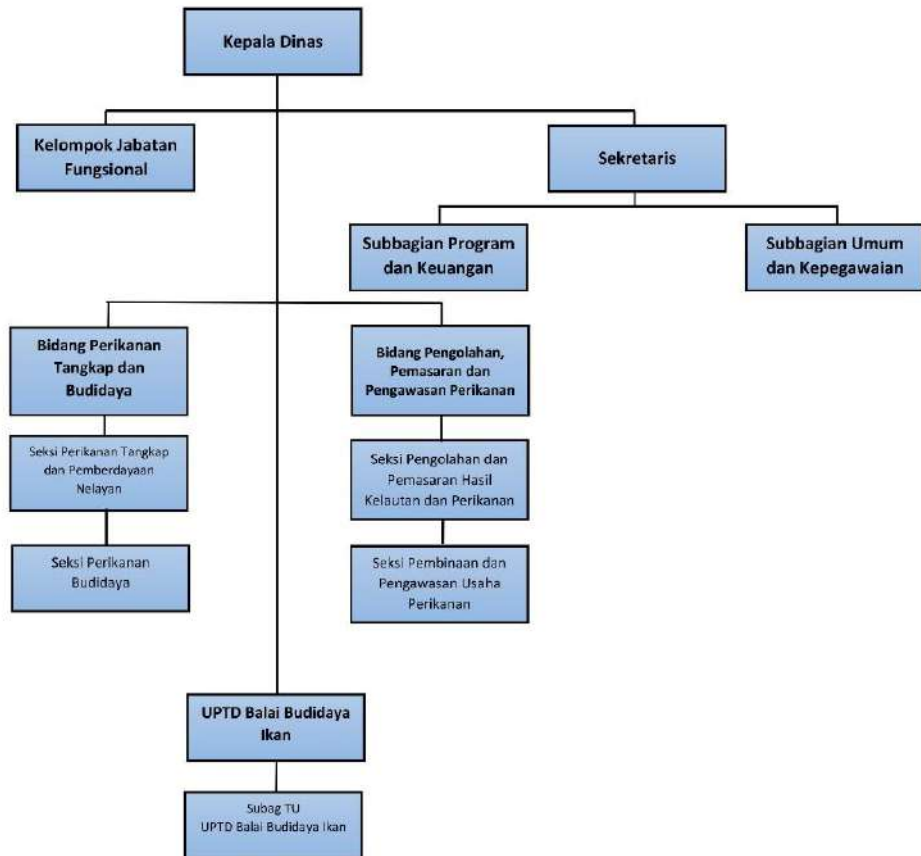
- k. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- l. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- n. Pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- o. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Struktur organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
 - Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan
 - Seksi Perikanan Budidaya
4. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
 - Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - UPTD Balai Budidaya Ikan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Struktur Organisasi
DKP Bantul Tahun 2021



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon IV di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut:

1. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat dalam melaksanakan tugas tersebut antara lain:

- Penyusunan rencana kerja Sekretariat
- Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
- Penyusunan program kerja Dinas
- Pengelolaan keuangan Dinas
- Pelaksanaan program kesekretariatan
- Penyelenggaraan kepegawaian Dinas
- Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas
- Penyelenggaraan kerumahtanggaan, keputakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas
- Penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
- Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas
- Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas
- Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi , dan penyusunan laporan kinerja Dinas
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Subbagian Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta dipimpin oleh Kepala

Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Fungsi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas tersebut antara lain:

- Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
 - Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
 - Pengelolaan keuangan Dinas;
 - Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
 - Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
 - Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas. Dalam menjalankan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi meliputi:
- Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris serta dipimpin oleh Kepala Bidang. Fungsi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas tersebut antara lain meliputi:

- Penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
- Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap dan budidaya
- Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya

- Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan
 - Pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
 - Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan
 - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan
 - Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, serta dipimpin oleh Kepala Seksi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan memiliki fungsi sebagai berikut:
- Penyusunan rencana kerja Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan;
 - Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan;
 - Penyediaan dan pengelolaan data sumberdaya ikan;
 - Fasilitasi penyediaan sarana prasarana usaha perikanan tangkap;
 - Pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
 - Fasilitasi pengembangan kelembagaan, bantuan pendanaan, dan pembiayaan dan kemitraan usaha bagi nelayan kecil;
 - Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil;
 - Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Seksi Perikanan Budidaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, serta dipimpin oleh Kepala Seksi. Fungsi yang dimiliki Seksi Perikanan Budidaya antara lain:
- Penyusunan rencana kerja Seksi Perikanan Budidaya;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembudidayaan ikan;
 - Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi pelaksanaan pembudidayaan ikan;
 - Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembudidayaan ikan;
 - Fasilitasi penyediaan prasarana dan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan;
 - Perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan perlindungan lahan dan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - Pelaksanaan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
 - Pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan;
 - Fasilitasi pengembangan kelembagaan, bantuan pendanaan, dan pembiayaan serta kemitraan usaha dan teknologi informasi bagi pembudi daya ikan kecil;
 - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan perikanan budidaya;
 - Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Perikanan Budidaya; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, serta dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengolahan, pemasaran, dan pengawasan perikanan. Fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas tersebut antara lain:

- Penyusunan rencana kerja Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
- Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengolahan pemasaran dan pengawasan hasil perikanan;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
- Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan perikanan;
- Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengolahan, pemasaran dan pengawasan hasil perikanan;
- Pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan/ nonperizinan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
- Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan serta dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas tersebut antara lain:

- Penyusunan rencana kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- Penyediaan data dan pengelolaan data dan informasi terkait pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan ikan pasca panen/pasca tangkap/budidaya;
- Pelaksanaan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;
- Fasilitasi pengembangan kelembagaan, bantuan pendanaan, dan pembiayaan serta kemitraan usaha dan teknologi informasi bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan serta dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengendalian, evaluasi, pembinaan dan pengawasan usaha perikanan. Fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas tersebut antara lain:
- Penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha perikanan;
 - Penyediaan dan pengelolaan data informasi pengawasan usaha perikanan dan pengolahan hasil perikanan;
 - Penyusunan konsep dan pelaksanaan penataan sentra usaha kecil perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
 - Penyiapan bahan pemberian rekomendasi perizinan/nonperizinan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
 - Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengawasan usaha perikanan;
 - Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Usaha Perikanan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Budidaya Ikan (UPTD BBI) merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas dinas dalam bidang perikanan. UPTD BBI dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan Organisasi UPTD BBI terdiri atas Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha.

UPTD BBI terdiri dari 5 unit kerja meliputi:

- a) BBI Barongan yang beralamat di Ngentak, Sumberagung, Jetis
- b) BBI Sanden yang beralamatdi Ngentak, Murtigading, Sanden
- c) BBI Gesikan yang beralamat di Gesikan, Wijirejo, Pandak
- d) BBI Krapyak yang beralamat di TegalKrapyak, Panggungharjo, Sewon
- e) BBI Pundong yang beralamat di Jl. Parangtritis Km. 17,5 Derso, Srihardono, Pundong.

UPTD BBI mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan budidaya ikan. Fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas tersebut antara lain:

- Penyusunan rencana kerja UPTD Balai Budidaya Ikan;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis budidaya Ikan;
 - Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi budidaya ikan;
 - Pelaksanaan kegiatan teknis operasional budidaya ikan;
 - Penyediaan benih ikan;
 - Pelaksanaan ketatausahaan;
 - Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Budidaya Ikan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Balai Budidaya Ikan. Fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas tersebut antara lain:
- Penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;

- Penyusunan rencana kegiatan UPTD Balai Budidaya Ikan;
- Penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- Penatausahaan kepegawaian;
- Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- Pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Balai Budidaya Ikan;
- Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- Pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
- Pengelolaan data dan sistem informasi
- Pelayanan informasi UPTD Balai Budidaya Ikan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Balai Budidaya Ikan;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain UPTD BBI, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang merupakan Unit Dinas untuk menyelenggarakan pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan di laut selatan Bantul yang juga berfungsi sebagai penghasil PAD sebagaimana UPTD BBI. Kabupaten Bantul memiliki 5 (lima) unit TPI yang tersebar di 3 (tiga) Kapanewon Pesisir, meliputi:

- TPI Depok yang beralamat di Depok, Parangtritis, Kretek
- TPI Ngepet yang beralamat di Ngepet, Srigading, Sanden
- TPI Patihan yang beralamat di Patihan, Gading, Sanden
- TPI Kuwaru yang beralamat di Kuwaru, Poncosari, Srandakan
- TPI Ngentak yang beralamat di Ngentak, Poncosari, Srandakan

5. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan

pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Kuantitas Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul kurang mencukupi dalam rangka penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantul. Melihat proses bisnis dan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul idealnya dibutuhkan sejumlah kurang lebih 60 (enam puluh) pegawai, namun saat ini baru ada 19 pegawai. Adapun jumlah pegawai berdasarkan komposisi jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1.

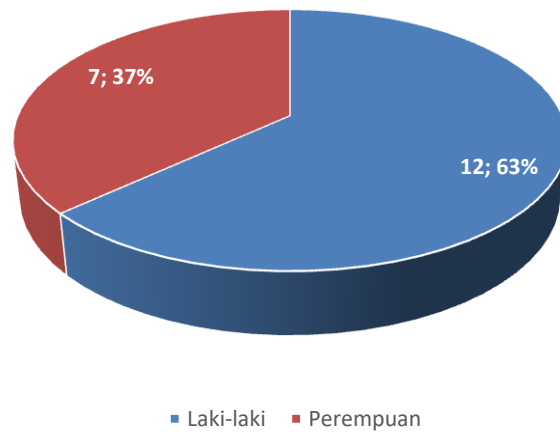
Tabel 2.1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	12
2	Perempuan	7
Total		19

Sumber: DKP per Juni 2022

Proporsi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan Gambar 2.2.

Data Pegawai



Gambar 2.2. Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebaran pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia Pegawai	Jumlah
1	≤ 25 tahun	0
2	26 tahun - 35 tahun	1
3	36 tahun - 45 tahun	8
4	46 tahun - 56 tahun	8
5	> 56 tahun	2
Total		19

Sumber: DKP per Juni 2022

Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Magister	9	47,37%
2	Sarjana	6	31,58%
3	Diploma	1	5,26%
4	SLTA	3	15,79%
Total		19	100,00%

Sumber: DKP per Juni 2022

Kompetensi SDM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal menunjukkan kualitas kompetensi yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar 47,37% dan untuk pegawai berpendidikan sarjana sebesar 31,58%. Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar. Serta mengikuti diklat dan pelatihan teknis yang mendukung penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantul. Tabel 2.3 dapat memberikan gambaran yang lebih mudah dalam melihat kualitas SDM di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dari sisi tingkat pendidikan.

Dilihat dari golongan, data pegawai per Juni 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagian besar merupakan pegawai dengan golongan III, yaitu sebesar 63,16%. Indikator karir pegawai adalah golongan kepangkatan. Perkembangan komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	2	10,53%
3	Golongan III	12	63,16%
4	Golongan IV	5	26,32%
Total		19	100,00%

Sumber: DKP per Juni 2022

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Perkembangan aset yang dimiliki Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, yang berupa tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, rinciannya dapat dilihat di Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Perkembangan Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (dalam ribuan rupiah)

Jenis Aset	Jumlah (dalam Rupiah)
1. Tanah	0
2. Peralatan Mesin	3.090.210.623
3. Gedung & Bangunan	22.445.129.086
4. Jalan, Irigasi & Jaringan	4.008.914.900
5. Aset Tetap Lainnya	293.048.275
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	-
Total	29.837.302.884

Sumber: DPPKP per 31 Desember 2020

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD BBI antara lain adalah produksi benih yang secara nyata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan produksi benih dan nilai produksi dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6. Produksi Benih Ikan dan Nilai Produksi benih UPTD BBI

No	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi (ekor)	3.364.975	4.362.005	4.629.118	4.530.470	4.118.504
2	Nilai (Rupiah)	158.099.500	197.482.000	216.413.400	227.372.000	226.622.000

Sumber: UPTD Balai Budidaya Ikan, 2020

Selama periode 5 tahun, BBI berhasil meningkatkan produksi benih sebesar 22,39% dengan rata-rata peningkatan 5,60% per tahun dan nilai produksi sebagai kontributor pendapatan asli daerah sebesar 85,67% dengan rata-rata peningkatan 21,42% per tahun. Keberhasilan ini ditunjang dengan program peningkatan pengelolaan balai benih ikan dengan melakukan perbaikan serta peningkatan sarana, prasarana, dan operasional yang disertai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi TPI selama 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7. Perolehan Retribusi TPI

	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Retribusi (Rupiah)	-	Rp75.994.773	Rp90.700.497	Rp114.256.300	Rp99.352.116

Sumber: Tempat Pelelangan Ikan, 2020

Berdasarkan statistik perikanan tangkap tahun 2020, produksi perikanan tangkap yang masuk ke tempat pelelangan ikan dibawah pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Produksi Perikanan Tangkap Laut Tahun 2020

No	Jenis Ikan	Produksi (kg)
1.	Bawal Hitam (<i>Parastromateus niger</i>)	51
2.	Bawal Putih (<i>Pampus argenteus</i>)	19.089
3.	Belanak (<i>Valamugil seheli</i>)	7.044
4.	Cakalang (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	55
5.	Ekor Kuning (<i>Paracaesio brevidentata</i>)	4.505
6.	Gulamah (<i>Gymnocranius griseus</i>)	8.366
7.	Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>)	2.673
8.	Japuh (<i>Dussumieria acuta</i>)	14.897
9.	Kakap Merah (<i>Lutjanus bitaeniatus</i>)	57
10.	Kakap Putih; Baramundi (<i>Lates calcarifer</i>)	2.384
11.	Kapas-kapas (<i>Gerres oyena</i>)	63

No	Jenis Ikan	Produksi (kg)
12.	Kembung (<i>Rastrelliger faughni</i>)	134
13.	Kepiting (<i>Carpilius maculatus</i>)	37
14.	Kerapu Karang (<i>Cephalopholis boenack</i>)	92
15.	Kuniran; Biji Nangka (<i>Upeneus sulphureus</i>)	48
16.	Kuro; Senangin (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>)	2.051
17.	Kuwe Gerong (<i>Caranx ignobilis</i>)	1.349
18.	Layur (<i>Trichiurus lepturus</i>)	45.823
19.	Lobster Pasir (<i>Panulirus homarus</i>)	2.394
20.	Manyung Besar (<i>Netuma thalassina</i>)	10.995
21.	Rajungan (<i>Portunus pelagicus</i>)	80
22.	Remang (<i>Congresox talabon</i>)	75
23.	Selar Bentong (<i>Selar crumenophthalmus</i>)	230
24.	Selar Kuning (<i>Selaroides leptolepis</i>)	37
25.	Talang-talang (<i>Scomberoides lysan</i>)	1.078
26.	Tenggiri (<i>Scomberomorus commerson</i>)	1.740
27.	Tongkol Abu-abu (<i>Thunnus tonggol</i>)	19
28.	Udang Jerbung (<i>Penaeus merguensis</i>)	3.224
29.	Ikan Lain/ <i>Others Fish</i>	15.039
30.	Pari/Rays(semua jenis)	4.238
Jumlah		147.865

Sumber: Tempat Pelelangan Ikan, DPPKP, 2020

Pemberlakuan sistem lelang di tempat pelelangan ikan menjadi salah satu usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan posisi tawar nelayan dalam transaksi hasil penangkapan ikan. Peningkatan sarana dan prasarana operasional dan pendukung tempat pelelangan ikan terus ditingkatkan untuk dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Sektor perikanan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB. Tujuan pembangunan perikanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, Meningkatkan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional dan Meningkatkan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan perikanan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi perikanan dan sarana produksi.

Pencapaian kinerja OPD didasarkan pada target dan realisasi selama periode 5 tahun sebelumnya atau 2016-2021 pada urusan perikanan sudah baik. Produksi budidaya dan penangkapan ikan masih perlu ditingkatkan agar mencapai target yang telah ditentukan. Produktivitas budidaya ikan dan penangkapan ikan dipengaruhi antara lain cuaca, iklim, kasus hama dan penyakit ikan serta penerapan teknologi yang belum optimal.

Capaian kinerja di Urusan Kelautan dan Perikanan memperlihatkan hasil yang sangat baik dapat dilihat pada Tabel 2.9. Indikator kinerja pada urusan ini adalah produksi perikanan, baik dari perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Dari Tahun 2016 – 2021 produksi perikanan mengalami peningkatan secara bervariasi. Hal ini terutama terjadi pada produksi perikanan tangkap yang sangat dipengaruhi oleh musim. Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan dengan dukungan dari penerapan teknologi baru. Teknologi tersebut menerapkan kolam bulat dengan *central drain* dan aerasi serta manajemen pakan dan air, sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik.

Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Produksi Perikanan	Ton	12.762	12.595	13.398,44	13.198	13.383	13.577	12.191,22	12.912,57	13.059,44	13.243,45	13.436,11	13.577	95,53	102,52	97,46	100,34	100,40	100
	Cakupan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	600	650	768,44	798	842	880	516,5	656,81	768,58	802,85	807,06	n/a	86,08	101,05	100,02	100,61	95,85	n/a
	Cakupan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	12.162	11.945	12.630	12.400	12.541	12.697	11.093,38	12.027,24	12.291,02	12.440,6	12.629,05	n/a	91,21	100,69	97,32	100,33	100,70	n/a
	Program pengembangan budidaya perikanan		n/a						n/a					n/a						
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (Terlaksananya kajian dan pengadaan sarpras perikanan budidaya)	paket	n/a	5	3	4	1	3	n/a	5	3	4	1	n/a	100	100	100	100		
	Peningkatan Kapasitas pengelolaan UPT BBI (Terlaksananya Operasional UPT BBI)	Bulan	n/a	12	12	12	12	12	n/a	12	12	12	12	n/a	100	100	100	100		
	Pengawasan, Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	kali	n/a	10	15	15	20	20	n/a	10	15	15	20	n/a	100	100	100	100		
	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan)	bulan	n/a	12	12	12	12	12	n/a	12	12	12	12	n/a	100	100	100	100		

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																			
	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan selama periode Renstra Tahun 2016-2021 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh ketersediaan SDM pengelola, aturan-aturan yang menunjang kelancaran realisasi anggaran, dan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang baik. Tantangan dalam pengelolaan anggaran adalah sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Upaya selalu dilakukan agar perencanaan anggaran untuk pelaksanaan program mampu memberikan hasil maksimal dalam sisi efektifitas, efisiensi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini kemudian didukung pula dengan proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran agar mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian proses penggunaan anggaran dengan perencanaan anggaran. Data selengkapnya pada Tabel 2.10.

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2017 adalah sebesar 50,32 % dan 64,82 % pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena ada sisa anggaran dari Gaji dan Tunjangan Kinerja yang tidak direalisasikan karena PNS tersebut sudah pensiun. Kemudian, realisasi Belanja Modal pada Tahun 2019 hanya sebesar 22,20 % disebabkan oleh belanja SILPA DAK Fisik Pertanian yang tidak bisa dilaksanakan karena terbatasnya waktu pelaksanaan karena ada di APBD Perubahan Tahun 2019. Sementara itu, Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 hanya sebesar 68,92 % disebabkan rendahnya hasil lelang pada beberapa pengadaan di Bidang Pertanian akibat pandemi Covid 19.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Perubahan iklim
2. Alih fungsi lahan.
3. Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan.
4. Penyebaran hama dan penyakit ikan.
5. Kenaikan harga pakan.
6. Masih rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM dan SDA perikanan;
2. Permintaan ikan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk;
3. Tersedianya akses perbankan untuk usaha perikanan;
4. Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi;
5. Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang perikanan;
6. Berkembangnya paradigma perikanan berkelanjutan, integrasi dan korporasi;
7. Tersedianya fasilitas pemasaran sampai ekspor.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan dengan menggunakan pendekatan *problem solving*. Metode yang dapat digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan dokumen renstra ini adalah dengan melakukan FGD yang melibatkan pemangku kepentingan di internal Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Hasil inventarisasi permasalahan dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap yang Belum Optimal	a. Pemanfaatan sumberdaya perikanan PUD yang belum optimal b. Pemberdayaan nelayan kecil yang belum optimal c. Pelayanan penyelenggaraan TPI yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi sumberdaya perikanan terbatas • Prasarana dan sarana usaha perikanan terbatas • Kompetensi nelayan relatif rendah • Peran kelembagaan kelompok belum optimal • Akses terhadap permodalan dan kemitraan masih terbatas • Prosedur pengelolaan TPI belum sesuai standar pelayanan
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya yang Belum Optimal	a. Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil yang belum optimal b. Pengelolaan pembudidayaan ikan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi sumberdaya perikanan terbatas • Prasarana dan sarana usaha budidaya ikan terbatas • Kompetensi pembudidaya ikan relatif rendah • Penerapan teknologi yang masih rendah • Peran kelembagaan kelompok belum optimal • Akses terhadap permodalan dan kemitraan masih terbatas

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
3	Pengawasan Usaha Perikanan yang Belum Optimal	Pengawasan usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pengelolaan BBI • Data dan informasi usaha perikanan yang terbatas • Penataan sentra usaha kecil yang belum berjalan dengan baik • Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan yang belum optimal • Pemberian rekomendasi perijinan/ non perijinan belum optimal
4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Belum Optimal	<p>a. Penerbitan tanda daftar usaha perikanan yang belum optimal</p> <p>b. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan yang belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi usaha pengolahan dan pemasaran yang terbatas • Bimtek penerapan standar mutu pada usaha pengolahan dan pemasaran masih terbatas • Prasarana dan sarana usaha budidaya ikan terbatas • Kompetensi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan relatif rendah • Penerapan teknologi yang masih rendah • Peran kelembagaan kelompok belum optimal • Akses terhadap permodalan dan kemitraan masih terbatas

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan

Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Program Bupati dan Wakil Bupati	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	MISI 3 Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.	-	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan SDA dan SDM perikanan di Kabupaten Bantul. - Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian di DIY - Tersedianya lembaga keuangan - Berkembangnya teknologi perikanan - Permintaan ikan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas dan kualitas SDM perikanan masih terbatas - Rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan - Kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk perikanan belum bisa memenuhi permintaan pasar - Sektor industrialisasi perikanan yang belum berkembang - Hasil riset dan inovasi belum dimanfaatkan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tujuan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat, dengan Indikator Kinerja, yaitu Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024.
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat, dengan indikator kinerja:
 - 1) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
 - 2) nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024; dan
 - 3) konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - 1) proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dari $\leq 64\%$ pada tahun 2020 mejadi $\leq 80\%$ pada tahun 2024; dan
 - 2) luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024.
4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat, dengan indikator kinerja:

- 1) persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dari 60 % pada tahun 2020 menjadi 75 % pada tahun 2024; dan
 - 2) kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020-2024.
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan, dengan indikator kinerja, yaitu hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 (lima) hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 (lima belas) hasil riset pada tahun 2024.
6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab, dengan indikator kinerja:
- 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari tiga WPPNRI pada tahun 2020 menjadi sebelas WPPNRI pada tahun 2024;
 - 2) penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi dua belas Rencana Zonasi pada tahun 2024 (102 kumulatif Rencana Zonasi tahun 2020-2024); dan
 - 3) persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.
7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing, dengan indikator kinerja:
- 1) produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024;
 - 2) produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;
 - 3) dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2024

- 4) kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari lima kawasan pada tahun 2020 menjadi lima puluh kawasan pada tahun 2024.
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif, dengan indikator kinerja:
- 1) persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
 - 2) persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan 93% dari tahun 2020 hingga tahun 2024; dan 3) tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.
9. Tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator kinerja:
- 1) nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 71 pada tahun 2020 menjadi 75 pada tahun 2024; dan
 - 2) nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kelautan Perikanan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Faktor Pendorong dan penghambat Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya teknologi budidaya dan pascapanen perikanan - Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Penyedia Benih Ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha perikanan pada umumnya masih skala kecil dan merupakan usaha sampingan - Ketersediaan Sarana dan prasarana usaha perikanan belum optimal - Fluktuasi harga input produksi pada komoditi perikanan. - Kompetensi pelaku usaha perikanan masih

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			kurang
2.	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	- Terdapat pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan	- Penguasaan teknologi budidaya, pengangkutan dan pengolahan sumber daya kelautan perikanan perlu ditingkatkan
3.	Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	- Adanya sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) - Jaminan usaha melalui ijin usaha perikanan	- Pengetahuan pelaku usaha perikanan tentang Konsep Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan masih belum merata - Belum adanya kawasan khusus perikanan budidaya yang terintegrasi
4.	Tersedianya kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang efektif	- Adanya komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan perikanan	- Koordinasi antar sektor masih perlu dioptimalkan.
5.	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	- Terdapat peraturan perundang-undangan di bidang perikanan	- Implementasi peraturan perundang-undangan masih perlu dioptimalkan
6.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang profesional dan partisipatif	- Terdapat peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan	- Koordinasi antar sektor masih perlu dioptimalkan.

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Isu Strategis Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY adalah sebagai berikut:

1. Produksi perikanan tangkap terkendala oleh kuantitas dan kualitas SDM, kualitas-kuantitas dan kapasitas alat tangkap, terkendala cuaca dan perubahan iklim sehingga hasil belum optimal.
2. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat karena ketidakpastian penghasilan, sehingga profesi nelayan dilakukan hanya sambilan dan pilihan pekerjaan terakhir.

3. Terjadinya trend laju percepatan alih fungsi lahan pertanian (termasuk lahan usaha perikanan) menjadi lahan perumahan, pemukiman, dan industri serta peruntukan lainnya pada beberapa tahun terakhir, akan berpotensi pada penurunan ketersediaan produk perikanan bagi masyarakat.
4. Kemiskinan nelayan masih tinggi dan ketimpangan ekonomi juga masih tinggi antara wilayah nelayan dengan wilayah daratan.

Sasaran jangka menengah dan Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam kurun waktu 2017-2022 adalah sebagai berikut:

No	Visi (RPJMD)	Misi (RPJMD)	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran
1	Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (Sumber BPS)
				Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi

No	Sasaran (Renstra)	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	89.336	89.400	89.500	89.600	89.700
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	5.817	6.199	6.481	6.863	7.063
		Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/thn)	N/A	24,55	25,21	25,48	26,05
		Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi produk perikanan olahan (ton)	8.201	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	84	86	88	90
		Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Produksi benih kan yang bersertifikat (juta ekor)	31,3	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pengelolaan Pelabuhan	Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan (milyar rupiah)	32,84	33,31	34,78	35,25	36,73

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat

pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul disajikan dalam Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya teknologi budidaya, penangkapan dan pascapanen perikanan - Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Penyedia Benih Ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan pada umumnya masih skala kecil dan usaha sampingan - Sarana dan prasarana perikanan belum optimal. - kenaikan harga input produksi dan fluktuasi harga jual komoditas perikanan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor perikanan sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan ditinjau dari implikasi RTRW disajikan dalam Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5. Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap				Wilayah kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek	- terbatasnya lahan dan sumber daya air - Penyediaan kawasan khusus membutuhkan proses dan dana yang besar	- Telah dilakukan studi kelayakan dan dokumen perencanaan - Tersedianya pelaku usaha perikanan. - Tersedianya teknologi perikanan
Pengembangan kawasan peruntukan budidaya perikanan				Kecamatan Banguntapan, Pandak, Piyungan, Pundong, Sanden, dan Sedayu		
Telaah Rencana Pola Ruang						
Pengembangan perikanan dan peningkatan produksi		Pengembangan SDM Perikanan		Seluruh wilayah Kab. Bantul	1. Kuantitas dan kualitas SDM perikanan terbatas	1. Potensi perikanan budidaya besar

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari isu strategis baik itu yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang di masa mendatang. Identifikasi isu strategis di sektor perikanan dan perikanan akan memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika lokal, regional, nasional dan internasional. Hasil identifikasi isu strategis bidang perikanan pangan kelautan dan perikanan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini meliputi:

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan;
2. Penanggulangan dampak perubahan iklim;
3. Pengendalian serangan hama dan penyakit ikan;

4. Regenerasi pelaku usaha perikanan;
5. Pengembangan pakan alternatif;
6. Penggunaan teknologi perikanan;
7. Peningkatan konsumsi makan ikan; dan
8. Pengawasan usaha perikanan.

Tabel 3.6. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pemerintah Daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan	20	10	20	10	5	7	72
2.	Penanggulangan dampak perubahan iklim	20	10	20	10	5	5	70
3.	Pengendalian serangan hama dan penyakit ikan	20	10	20	10	15	13	88
4.	Regenerasi pelaku usaha perikanan	20	10	20	10	10	22	92
5.	Pengembangan pakan alternatif	20	10	20	10	10	8	78
6.	Penggunaan teknologi perikanan	20	10	20	10	10	25	95
7.	Peningkatan konsumsi makan ikan	20	10	20	10	10	20	90
8.	Pengawasan usaha perikanan	20	10	20	10	10	15	85

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan	72	12,00
2.	Penanggulangan dampak perubahan iklim	70	11,67
3.	Pengendalian serangan hama dan penyakit ikan	88	14,67
4.	Regenerasi pelaku usaha perikanan	92	15,33
5.	Pengembangan pakan alternatif	78	13,00
6.	Penggunaan teknologi perikanan	95	15,83
7.	Peningkatan konsumsi makan ikan	90	15,00
8.	Pengawasan usaha perikanan	85	14,17

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran jangka menengah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi periode perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan memperhatikan potensi internal dan eksternal. Indikator kinerja selanjutnya menjadi acuan penilaian kinerja periode 2021-2026. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran		Kondisi Awal Renstra (Tahun baseline/Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Renstra 2026
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya pemerataan pendapatan		Rasio Gini	Angka	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	%	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,65

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi dan kebijakan dengan menggunakan analisis SWOT. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dari hasil identifikasi tantangan dan peluang sebagai faktor eksternal serta identifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal perangkat daerah dapat dirumuskan alternatif strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1. Analisis SWOT

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya SDA perikanan - Permintaan ikan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk; - Tersedianya akses perbankan untuk usaha perikanan; - Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi; - Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen serta informasi perikanan; - Berkembangnya paradigma perikanan berkelanjutan, integrasi dan koorporasi; - Tersedianya fasilitas pemasaran sampai ekspor. 	<p>Ancaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan iklim - Alih fungsi lahan. - Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan. - Penyebaran hama dan penyakit ikan. - Kenaikan harga pakan. - Masih rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan
<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya OPD di bidang perikanan yang didukung unit pelaksana teknis - Tersedia SDM Aparatur dan pelaku usaha perikanan - Tersedianya sarana dan prasarana perikanan - Adanya regulasi usaha perikanan - Adanya kelembagaan pelaku usaha perikanan 	<p>Alternatif Strategi SO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran institusi / OPD untuk memenuhi kebutuhan ikan hingga ekspor - Mengoptimalkan lahan perikanan yang berkelanjutan melalui penyediaan sarana prasarana - Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan melalui pemanfaatan teknologi produksi dan pascapanen - Meningkatkan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Budidaya - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Tangkap 	<p>Alternatif Strategi ST:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan sistem produksi perikanan yang berkelanjutan berbasis informasi iklim - Meningkatkan peran OPD untuk mewujudkan generasi muda nelayan - Meningkatkan penggunaan pakan mandiri - Meningkatkan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Budidaya - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Tangkap

<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM Aparatur dan pelaku usaha perikanan terbatas jumlah dan kompetensinya - sarana dan prasarana perikanan yang terbatas - regulasi usaha perikanan masih terbatas - Produktivitas usaha perikanan belum optimal - Peran kelembagaan perikanan belum optimal - Produksi olahan ikan masih rendah 	<p>Alternatif Strategi WO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan kompetensi aparatur untuk menerapkan teknologi perikanan - Mengoptimalkan pelaku usaha untuk menerapkan teknologi perikanan - Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk memenuhi permintaan pasar - Mengoptimalkan produksi pengolahan ikan melalui penerapan teknologi - Meningkatkan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Budidaya - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Tangkap 	<p>Alternatif Strategi WT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan SDM untuk pengelolaan perikanan berbasis informasi iklim - Mengoptimalkan peran SDM untuk mengatasi hama dan penyakit ikan - Mengoptimalkan peran SDM untuk mendorong minat generasi muda menjadi nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya - Meningkatkan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Budidaya - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Tangkap
--	--	--

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah terdapat pada Tabel 5.2

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

<p>VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BERBhinneka Tunggal Ika</p>			
<p>MISI 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Terwujudnya pemerataan pendapatan</p>	<p>Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat</p>	<p>Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Tangkap</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi dan jumlah nelayan - Peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BERBhinneka Tunggal Ika

MISI 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			- Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok usaha bersama
		Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Peningkatan kompetensi dan jumlah pembudidaya ikan - Peningkatan sarana prasarana pembudidaya ikan - Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pembudidaya ikan
		Meningkatkan Pengawasan Usaha Perikanan	- Peningkatan kompetensi dan jumlah personil pengawas usaha perikanan - Peningkatan sarana prasarana pengawasan usaha perikanan
		Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Peningkatan kompetensi dan jumlah pengolah dan pemasar ikan - Peningkatan sarana prasarana pengolah dan pemasar ikan - Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.

Program yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. *Outcome* program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/ pendanaan untuk melaksanakan program/ kegiatan pertahun.

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menterjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 6.1. berikut.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	Lokasi			
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			Kondisi Akhir Periode		
								TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Terwujudnya pemerataan pendapatan			Rasio Gini	$G = 1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi	0,37	0,36		0,35		0,325		0,32		0,31		0,31				
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat			Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun ini dikurangi Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun dasar dibagi Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun dasar dikali 100%	0,4	0,45		0,5		0,55		0,6		0,65		0,65		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kabupaten Bantul Semua Kapanewon Semua Kalurahan	
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Tercapainya Kalurahan Bahari yang direvitalisasi															Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Kabupaten Bantul Kecamatan Kretek Kecamatan Sanden Kecamatan Srandakan Desa Parangtritis Desa Tirohargo Desa Srigading Desa Gadingsari Desa Poncosari	
				Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Kalurahan bahari yang direvitalisasi	n/a			20 persen	125.000.000	60 persen	250.000.000	80 persen	125.000.000	100 persen	125.000.000	100 persen	625.000.000	Bidang Perikanan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode	
								TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					dibagi jumlah kalurahan bahari dikali 100%														Tangkap dan Budidaya	Kecamatan Kretek Kecamatan Sanden Kecamatan Srandakan Desa Parangtritis Desa Tirtohargo Desa Srigading Desa Gadingsari Desa Poncosari	
		2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terpenuhinya Kalurahan Bahari yang ditetapkan	Terlaksananya Kalurahan Bahari yang ditetapkan														Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
				Kalurahan Bahari yang ditetapkan	Jumlah kalurahan bahari yang ditetapkan	5 kalurahan			1 kalurahan	125.000.000									Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Tercapainya persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan															Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Kabupaten Bantul Kecamatan Kretek Kecamatan Sanden Kecamatan Srandakan Desa Parangtritis Desa Tirtohargo Desa Srigading Desa Gadingsari Desa Poncosari	
				Persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan	Jumlah Kalurahan Bahari yang dikembangkan hingga tahun n dibagi Jumlah Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan			20 persen	125.000.000	60 persen	250.000.000	80 persen	125.000.000	100 persen	125.000.000	100 persen	625.000.000	Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Kabupaten Bantul Kecamatan Kretek Kecamatan Sanden Kecamatan		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode	
								TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					dikalikan 100%															Srandakan	
		2.22.08.5.06.05	Pengembangan Budaya Bahari	- peserta pelatihan modifikasi alat tangkap	- Jumlah peserta pelatihan modifikasi alat tangkap	n/a			25 Orang	125.000.000										Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				- peserta pelatihan regenerasi nelayan	- Jumlah peserta pelatihan regenerasi nelayan				25 Orang												
				- peserta pelatihan perbengkelan kapal	- Jumlah peserta pelatihan perbengkelan kapal				25 Orang												
				- peserta pelatihan pengolahan ikan	- Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan				25 Orang												
		2.22.08.5.06.05	Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	n/a			4 objek	125.000.000	6 objek	250.000.000	6 objek	125.000.000	6 objek	125.000.000	6 objek	625.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Kecamatan Kretek Kecamatan Sanden Kecamatan Srandakan Desa Parangtritis Desa Tirtohargo Desa Srigading Desa Gadingsari Desa Poncosari	
				- pelatihan modifikasi alat tangkap	- Jumlah peserta pelatihan modifikasi alat tangkap	n/a			25 Orang						25 Orang			50 Orang			
				- Regenerasi nelayan	- Jumlah peserta pelatihan regenerasi nelayan	n/a			25 Orang		25 Orang		25 Orang					75 Orang			
				- Magang calon nelayan	- Jumlah peserta pelatihan regenerasi nelayan	n/a					25 Orang		25 Orang		25 Orang			75 Orang			
				- Pengembangan perbengkelan kapal	- Jumlah peserta pelatihan perbengkelan kapal	n/a			25 Orang									25 Orang			
				- Jumlah Peserta	- Jumlah Peserta	n/a					25 Orang							25 Orang			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode			
								TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Magang Perbengkelan Kapal	n/a					1 Paket				1 Paket		2 Paket				
					*- Sarana Prasarana Perbengkelan Kapal	n/a															
					*- Workshop Perbengkelan Kapal	n/a							1 unit				1 Unit				
				- Pengembangan pengolahan ikan	- Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	n/a		25 Orang		25 Orang			25 Orang		25 Orang		100 Orang				
					*- Fasilitas sarana prasarana pengolahan	n/a				1 paket			1 paket		1 paket		3 paket				
				- Pengembangan pembuatan perahu fiber	*- Jumlah peserta pelatihan pembuatan perahu fiber	n/a				25 Orang							25 Orang				
					*- Fasilitas sarana prasarana pembuatan perahu fiber	n/a				1 Paket			1 Paket				2 Paket				
					*- Fasilitas workshop pembuatan perahu fiber	n/a							1 unit				1 unit				
					*- Pendampingan perijinan (kelaikan perahu fiber)	n/a									1 perijinan		1 perijinan				
				- Pengembangan Kampung Lele	*- Jumlah peserta pelatihan budidaya lele	n/a				25 Orang							25 Orang				
					*- Fasilitas sarana prasarana pendukung Kampung Lele	n/a							1 Paket		1 Paket		2 Paket				
					*- Fasilitas sarana prasarana budidaya lele	n/a							1 Paket		1 Paket		2 Paket				
				- Pengembangan Kampung Gurami	*- Jumlah peserta pelatihan budidaya lele	n/a				25 Orang							25 Orang				
					*- Fasilitas sarana prasarana pendukung Kampung Lele	n/a							1 Paket		1 Paket		2 Paket				
					*- Fasilitas sarana prasarana budidaya lele	n/a							1 Paket		1 Paket		2 Paket				
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																	
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah	84 angka	84 angka	3.196.640.669	85 angka	4.495.336.608	85 angka	4.718.160.613	85 angka	4.957.862.719	85 angka	5.224.959.236	85 angka	61.789.735.205	Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.	Perencanaan,	Terpenuhinya															Sekretariat	Kabupaten	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TAHUN 2021	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		2.01	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah																	Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	12.000.000	100 Persen	59.000.000	100 Persen	53.000.000	100 Persen	53.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	242.000.000	Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan		2 dokumen	2 dokumen	2.000.000													Sub Bagian Program dan Keuangan Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan dalam tahun n (RKA th n+1; RKA Perubahan th n; DPA th n; DPPA th n; Renja th n+1; Renstra)	2 dokumen	6 dokumen	2.000.000	5 dokumen	18.000.000	5 dokumen	18.000.000	5 dokumen	18.000.000	6 dokumen	25.000.000	6 dokumen	81.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi Laporan pelaksanaan monev dana bergulir		3 dokumen	3 dokumen	5.000.000													Subbag Program Keuangan Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Laporan pelaksanaan monev retribusi		1 dokumen	1 dokumen														
				peserta Bimtek ASN/Aparatur		60 Orang															
		3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	5.000.000										3 laporan	5.000.000	Subbag Program Keuangan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	16 laporan	5.000.000	16 laporan	41.000.000	16 laporan	35.000.000	16 laporan	35.000.000	16 laporan	40.000.000	16 laporan	156.000.000	Subbag Program Keuangan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar			4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode			
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Realisasi Kinerja SKPD															
					a. LPPD		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
					b. LKPJ		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
					c. LKJ		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
					d. AKIP		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
					- Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan			
		3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan															Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	2.556.013.279	100 Persen	2.597.938.378	100 Persen	2.673.262.383	100 Persen	2.776.964.489	100 Persen	2.781.459.236	100 Persen	13.385.637.765	Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14 dokumen	4 dokumen	3.794.669.003											Subbag Program Keuangan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Pembayaran TPP		12 dokumen	2 dokumen													
		3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	572 Orang/bulan	572 Orang/bulan	2.446.013.279	572 Orang/bulan	2.487.938.378	572 Orang/bulan	2.560.762.383	572 Orang/bulan	2.664.464.489	572 Orang/bulan	2.666.459.236	572 Orang/bulan	12.369.163.499	Subbag Program Keuangan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
					- Pembayaran gaji ASN		308 Orang/bulan	1.348.655.724	308 Orang/bulan	1.355.669.000	308 Orang/bulan	1.375.462.000	308 Orang/bulan	1.391.830.000	308 Orang/bulan	1.410.759.000	308 Orang/bulan	6.882.375.724		
					- Tunjangan ASN		264 Orang/bulan	1.097.357.555	264 Orang/bulan	1.097.357.555	264 Orang/bulan	1.097.357.555	264 Orang/bulan	1.097.357.555	264 Orang/bulan	1.097.357.555	264 Orang/bulan	5.486.787.775		
		3.25.01.2.02.02	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	n/a		105.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	4 dokumen	525.000.000	Subbag Program Keuangan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	n/a	19 laporan	5.000.000	22 laporan	5.000.000	22 laporan	7.500.000	22 laporan	7.500.000	22 laporan	10.000.000	107 laporan	35.000.000	Subbag Program Keuangan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELIN E)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERA NGKAT DAER AH	Lokasi		
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode	
								TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															Semua Desa	
					a. Laporan keuangan		19 laporan		19 laporan		19 laporan		19 laporan		19 laporan		95 laporan				
					- Laporan bulanan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		60 laporan				
					- Laporan triwulanan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		20 laporan				
					- Laporan semesteran		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		10 laporan				
					- CALK		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan				
					b. DAIS				3 laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan		12 laporan				
					- laporan tahap 1 dan 2				2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		8 laporan				
					- laporan tahap akhir				1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		4 laporan				
		3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah																Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen		100 Persen	2.000.000	100 Persen	2.000.000	100 Persen	2.000.000	100 Persen	2.000.000	100 Persen	8.000.000		Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen			1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	4 dokumen	8.000.000		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinyacapaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian													25 Orang	39.000.000		Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		20 Orang	12.000.000	20 Orang	17.000.000	20 Orang	17.000.000	20 Orang	17.000.000	20 Orang	24.000.000	100 Orang	48.000.000		Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok Monev : Peremajaan data kepeg, pensiun, gaji berkala, kenaikan pangkat. Dok penilaian kinerja: peningkatan	5 dokumen	5 dokumen	3.000.000	5 dokumen	8.000.000	5 dokumen	8.000.000	5 dokumen	8.000.000	5 dokumen	12.000.000	25 dokumen	39.000.000		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode	
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					kapasitas peg)															
		3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		20 Orang	9.000.000	20 Orang	9.000.000	20 Orang	9.000.000	20 Orang	9.000.000	20 Orang	12.000.000	100 Orang	48.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya capaian kinerja pengelolaan administrasi umum															Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen 145.875.000	100 Persen	382.000.000	100 Persen	482.500.000	100 Persen	533.000.000	100 Persen	667.500.000	100 Persen	1.995.875.000	Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik		11 jenis	11 jenis 10.000.000												Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		11 Paket	12 Paket 10.000.000	12 Paket	40.000.000	12 Paket	40.000.000	12 Paket	45.000.000	12 Paket	65.000.000	60 Paket	200.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
				- DKP			6 Paket		6 Paket		6 Paket		6 Paket		6 Paket		6 Paket			
				- UPTD BBI			4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket			
				- TPI			2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket			
		3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		46 Jenis	30 Jenis 20.000.000												Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket 20.000.000	12 Paket	65.000.000	12 Paket	75.000.000	12 Paket	75.000.000	12 Paket	95.000.000	60 Paket	330.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		28 jenis	20 jenis 15.000.000												Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode			
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	15.000.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	30.000.000	12 Paket	45.000.000	12 Paket	65.000.000	60 Paket	180.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan		6 jenis	3 jenis	10.000.000											Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Penggandaan		21.044 lembar	21.044 lembar													
		3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		7 Paket	12 Paket	10.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	30.000.000	12 Paket	35.000.000	60 Paket	120.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				- Barang Cetak			6 Paket		6 Paket		6 Paket		6 Paket		6 Paket		30 Paket			
				- Penggandaan			6 Paket		6 Paket		6 Paket		6 Paket		6 Paket		30 Paket			
		3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		1 jenis	1 jenis	5.500.000											Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 dokumen	12 dokumen	5.500.000	12 dokumen	6.000.000	12 dokumen	6.500.000	12 dokumen	7.000.000	12 dokumen	7.500.000	60 dokumen	32.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 laporan	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	8.000.000	5 laporan	28.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 dokumen	1 dokumen	80.375.000											Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
						1 dokumen	1 dokumen													
						1 dokumen	1 dokumen													
						20 OP	20 OP													
		3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan		12 laporan	12 laporan	80.375.000	12 laporan	175.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	275.000.000	12 laporan	325.000.000	60 laporan	1.105.375.000	Subbag Umum dan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	Lokasi				
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode			
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																Kepegawaian	Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 dokumen			1 dokumen	11.000.000		1 dokumen	11.000.000		1 dokumen	2.000.000		4 dokumen	35.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 dokumen			1 dokumen	35.000.000		1 dokumen	40.000.000		1 dokumen	65.000.000		4 dokumen	180.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah																Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
				Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	159.275.000	100 Persen	585.000.000		100 Persen	585.000.000		100 Persen	525.000.000		100 Persen	530.000.000	2.384.275.000	Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan kantor		5 jenis	8 jenis	89.647.610													Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 jenis	3 jenis	89.647.610	3 jenis	175.000.000		4 jenis	175.000.000	5 jenis	175.000.000	5 jenis	180.000.000	20 jenis	794.647.610	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 Unit		24.000.000													Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		n/a	1 Unit	69.627.390	1 Unit	410.000.000		1 Unit	410.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	350.000.000	5 Unit	1.589.627.390	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
																					Semua Desa
		3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	139.062.390	100 Persen	332.398.230	100 Persen	330.398.230	100 Persen	335.898.230	100 Persen	370.000.000	100 Persen	1.507.757.080	Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		600 lembar	300 lembar	3.000.000												Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.500.000	1 laporan	4.000.000	1 laporan	4.500.000	1 laporan	5.000.000	5 laporan	20.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening internet		12 bulan	12 bulan	9.000.000												Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Pembayaran rekening listrik		12 bulan	12 bulan														
				Pembayaran rekening telpon		12 bulan	12 bulan														
		3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	1 laporan	6.000.000	1 laporan	13.000.000	1 laporan	13.000.000	1 laporan	13.000.000	1 laporan	17.500.000	5 laporan	62.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		n/a	1 laporan	3.000.000	1 laporan	57.000.000	1 laporan	57.000.000	1 laporan	62.000.000	1 laporan	85.000.000	5 laporan	264.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelola keuangan dan barang		12 bulan	12 bulan	127.062.390												Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
																					Semua Desa
				Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DKP		12 dokumen	12 dokumen														
				Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DKP		12 dokumen	12 dokumen														
				Laporan pengelolaan administrasi perkantoran		12 dokumen	12 dokumen														
				Laporan pengelolaan front office di DKP		12 dokumen	12 dokumen														
				Laporan pengelolaan komputer dan informasi DKP		12 dokumen	12 dokumen														
				Sewa tanah/lahan		6 lokasi	6 lokasi														
		3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan	1 laporan	127.062.390	1 laporan	258.898.230	1 laporan	256.398.230	1 laporan	256.398.230	1 laporan	262.500.000	5 laporan	1.161.257.080	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya capaian kinerja pemeliharaan Barang Milik Daerah															Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
				Capaian kinerja pemeliharaan Barang Milik Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	172.415.000	100 Persen	520.000.000	100 Persen	575.000.000	100 Persen	715.000.000	100 Persen	785.000.000	100 Persen	42.226.190.360	Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		n/a			10 Unit	125.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	175.000.000	10 Unit	195.000.000	10 Unit	645.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
				- Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara		n/a			10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit				
				a. roda 2/3		n/a			8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit				
				b. roda 4		n/a			2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit				
				- Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayar pajak		n/a			10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit				
				a. roda 2/3		n/a			8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit				
				b. roda 4		n/a			2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit				
		3.25.01.2	Penyediaan Jasa	Bahan Bakar Minyak		6.000 liter	7.140 liter	137.415.000											Subbag	Kabupaten	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode	
							TAHUN 2021	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		.09.02	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					00											Umum dan Kepegawaian	Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				pajak kendaraan bermotor roda 2/3		200 Unit	51 Unit													
				pajak kendaraan bermotor roda 4		10 Unit	5 Unit													
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2/3		200 Unit	20 unit													
				pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		10 Unit	5 unit													
		3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		43 Unit	45 Unit	137.415.000	35 Unit	205.000.000	35 Unit	225.000.000	35 Unit	245.000.000	35 Unit	265.000.000	35 Unit	1.077.415.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				- Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara		43 Unit	45 Unit		35 Unit		35 Unit		35 Unit		35 Unit		35 Unit			Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				a. roda 2		35 Unit	35 Unit		27 Unit		27 Unit		27 Unit		27 Unit		27 Unit			
				b. roda 3		3 Unit	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit			
				c. roda 4		5 Unit	7 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit			
				- Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayar pajak		43 Unit	45 Unit		35 Unit		35 Unit		35 Unit		35 Unit		35 Unit			
				a. roda 2		35 Unit	35 Unit		27 Unit		27 Unit		27 Unit		27 Unit		27 Unit			
				b. roda 3		3 Unit	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit			
				c. roda 4		5 Unit	7 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit			
		3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			n/a	5 jenis	10.000.000											Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	3 Unit	10.000.000	1 Unit	15.000.000	5 Unit	25.000.000	6 Unit	45.000.000	7 Unit	75.000.000	22 Unit	170.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
																					Semua Desa
		3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor		1 unit	1 Unit	25.000.000													Subbag Umum dan Kepegawaian Semua Kecamatan Semua Desa
				Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di BBI / TPI		2 Unit	2 Unit														
		3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	3 Unit	25.000.000	4 Unit	175.000.000	5 Unit	175.000.000	6 Unit	250.000.000	8 Unit	250.000.000	26 Unit	875.000.000			Subbag Umum dan Kepegawaian Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Tercapainya produksi perikanan tangkap																	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan
				Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap	829 ton	829 ton	187.675.120	831 ton	292.175.120	833 ton	404.490.000	835 ton	662.675.120	837 ton	319.975.120	837 ton	1.866.990.480			Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan																	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan
				Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	Jumlah stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan dibagi jumlah stok ikan di perairan umum daratan dikali 100%	50 persen	50 persen	1.000.000	50 persen	62.000.000	52 persen	3.000.000	54 persen	5.000.000	58 persen	5.000.000	50 persen	76.000.000			Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan
		3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		1 dokumen	1 dokumen	1.000.000													Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	2 dokumen	62.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	66.000.000			Seksi Perikanan Tangkap dan

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Ikan	Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia															Pemberdayaan Nelayan	Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	n/a					1 Unit	2.000.000	2 Unit	4.000.000	2 Unit	4.000.000	1 Unit	10.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kepemilikan sertifikat kompetensi bagi nelayan																Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi jumlah nelayan dikali 100 %	5 persen	5 persen	6.700.000	5 persen	41.200.000	5 persen	174.700.000	5 persen	126.700.000	5 persen	105.000.000	25 persen	454.300.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Peserta Pelatihan Penangkapan ikan		20 Orang	20 Orang	950.000												Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	20 Orang	950.000	25 Orang	25.950.000	30 Orang	136.950.000	35 Orang	86.950.000	40 Orang	60.000.000	150 Orang	310.800.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok Nelayan yang dibina		5 kelompok	5 kelompok	4.750.000												Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya	5 kelompok	5 kelompok	4.750.000	8 kelompok	14.250.000	12 kelompok	34.750.000	15 kelompok	34.750.000	18 kelompok	40.000.000	58 kelompok	128.500.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan	Dokumen Kerjasama Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha		1 unit usaha	1 unit usaha	1.000.000												Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode		
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Usaha																		
		3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1 unit usaha	1 unit usaha	1.000.000	1 unit usaha	1.000.000	3 unit usaha	3.000.000	5 unit usaha	5.000.000	5 unit usaha	5.000.000	15 unit usaha	15.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang operasional															Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
				Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang operasional dibagi Jumlah Tempat Pelelangan Ikan dikali 100 %	100 persen	100 persen	179.975.120	100 persen	188.975.120	100 persen	202.790.000	100 persen	506.975.120	100 persen	185.975.120	100 persen	1.264.690.480	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	n/a			1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	20.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Laporan pemantauan pelayanan pelelangan ikan		12 dokumen	12 dokumen	179.975.120													
				Pengadaan sarana prasarana TPI		1 jenis	1 jenis												Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 layanan	1 layanan	179.975.120	1 layanan	183.975.120	1 layanan	197.790.000	1 layanan	501.975.120	1 layanan	180.975.120	1 layanan	1.244.690.480	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	Terpenuhinya penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT															Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
				Persentase Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Diterbitkan Dibagi Jumlah Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Dikali 100 %	n/a					5 persen	8.000.000	8 persen	8.000.000	10 persen	8.000.000	10 persen	24.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.04.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a					1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	9.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.04.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	n/a					5 rekomendasi	5.000.000	5 rekomendasi	5.000.000	5 rekomendasi	5.000.000	15 rekomendasi	15.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan															Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
				Persentase Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Diterbitkan	Jumlah Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Diterbitkan	n/a					5 persen	8.000.000	8 persen	8.000.000	10 persen	8.000.000	10 persen	24.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Dibagi Jumlah Usaha Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Dikali 100 %																
		3.25.03.2.05.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a					1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	9.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.05.02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	n/a					5 rekomendasi	5.000.000	5 rekomendasi	5.000.000	5 rekomendasi	5.000.000	15 rekomendasi	15.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT berstatus operasi																Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Persentase Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi yang Didaftarkan	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi yang Didaftarkan Dibagi Jumlah Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi Dikali 100 %	n/a					5 persen	8.000.000	8 persen	8.000.000	10 persen	8.000.000	10 persen	24.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.06.01	Penetapan Persyaratan dan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur	Jumlah Persyaratan dan Prosedur	n/a					1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	9.000.000	Seksi Perikanan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota															Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.03.2.06.02	Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	n/a					5 rekomendasi	5.000.000	5 rekomendasi	5.000.000	5 rekomendasi	5.000.000	15 rekomendasi	15.000.000		Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Tercapainya produksi perikanan budidaya																Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	12.740 ton	12.740 ton	1.459.882.000	12.805 ton	1.474.817.880	12.878 ton	3.610.882.000	12.959 ton	1.613.413.880	13.046 ton	2.133.888.880	13.046 ton	10.292.884.640		Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penerbitan rekomendasi usaha perikanan																Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Penerbitan rekomendasi usaha perikanan	Jumlah rekomendasi usaha perikanan yang diterbitkan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	2.050.000	1 rekomendasi	4.050.000	1 rekomendasi	20.050.000	1 rekomendasi	20.050.000	1 rekomendasi	20.050.000	1 rekomendasi	66.250.000		Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04.2.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	Perubahan Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan	Jumlah Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan yang ditetapkan	1 peraturan bupati	1 peraturan bupati	1.000.000												Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TAHUN 2021	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																		
		3.25.04.2.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1.000.000	1 rekomendasi	3.000.000	1 rekomendasi	5.000.000	1 rekomendasi	5.000.000	1 rekomendasi	5.000.000	1 rekomendasi	19.000.000	Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Laporan pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan	Laporan pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan	1 dokumen	1 dokumen	1.050.000											Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan izin usaha perikanan		10 kelompok	10 kelompok														
		3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1.050.000	1 rekomendasi	1.050.000	1 rekomendasi	15.050.000	1 rekomendasi	15.050.000	1 rekomendasi	15.050.000	5 rekomendasi	47.250.000	Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tercapainya pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik																Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	Jumlah Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	140 pembudidaya	142 pembudidaya	600.700.000	144 pembudidaya	550.700.000	146 pembudidaya	588.700.000	148 pembudidaya	691.231.880	150 pembudidaya	781.231.880	150 pembudidaya	3.212.563.760	Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok Pembudidaya ikan penerima Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok Pembudidaya ikan penerima Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 kelompok	5 kelompok	4.750.000												Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 kelompok	5 kelompok	4.750.000	5 kelompok	4.750.000	35 kelompok	44.750.000	36 kelompok	45.281.880	54 kelompok	110.281.880	135 kelompok	209.813.760	Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Ikan Kecil																		
		3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta Pelatihan Perikanan Budidaya	Jumlah peserta Pelatihan Perikanan Budidaya	224 Orang	480 Orang	595.950.000												Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15 kelompok	24 kelompok	595.950.000	20 kelompok	545.950.000	24 kelompok	543.950.000	26 kelompok	645.950.000	27 kelompok	670.950.000	121 kelompok	3.002.750.000	Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya produksi benih ikan air tawar																Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Peningkatan produksi benih ikan air tawar	(Jumlah produksi benih ikan air tawar tahun n dikurangi jumlah produksi benih ikan air tawar n-1) dibagi jumlah produksi benih ikan air tawar tahun n-1 dikali 100%	5 persen	5 persen	857.132.000												Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya																Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Peningkatan produksi perikanan budidaya	(Jumlah produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi jumlah produksi perikanan budidaya tahun n-1) dibagi jumlah produksi perikanan budidaya tahun n-1 dikali 100%	0,5 persen	0,5 persen	50.770.240	0,75 persen	113.706.120	1 persen	195.770.240	1,25 persen	95.770.240	1,5 persen	150.770.240	1,5 persen	606.787.080	Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	n/a			2 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	154.000.000	Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode		
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota																Semua Desa
		3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	1 dokumen	1 dokumen	49.820.240													Seksi Perikanan Budidaya Semua Kecamatan Semua Desa
				Laporan pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	Laporan pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	12 dokumen	12 dokumen														
		3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 dokumen	1 dokumen	49.820.240	1 dokumen	49.820.320	1 dokumen	74.820.240	1 dokumen	72.820.240	1 dokumen	112.820.240	5 dokumen	360.101.280			Seksi Perikanan Budidaya Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	peserta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik	Jumlah peserta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik	20 Orang	20 Orang	950.000													Seksi Perikanan Budidaya Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	20 Orang	950.000	25 Orang	13.885.800	40 Orang	20.950.000	40 Orang	20.950.000	60 Orang	35.950.000	185 Orang	92.685.800			Seksi Perikanan Budidaya Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (UPTD BBI)	Meningkatnya produksi benih ikan air tawar																	UPTD Balai Budidaya Ikan (BBI) Kabupaten Bantul Kecamatan Sewon Kecamatan Jetis Kecamatan Pandak Kecamatan Pundong Kecamatan Sanden Desa Panggungharjo Desa Sumberagung Desa Wijirejo Desa Srihardono Desa Sriharjo Desa Caturharjo

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode			
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				pembenihan ikan di BBI Krapyak																
				Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Pundong		12 dokumen	12 dokumen													
				Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Sanden		12 dokumen	12 dokumen													
				Produksi benih ikan air tawar		4.118.504 ekor	4.118.504 ekor													
				Produksi Ikan Konsumsi		684 Kg	684 Kg													
				Rehabilitasi BBI (Prioritas)																
		3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	806.361.760	5 Unit	806.361.760	5 Unit	2.806.361.760	5 Unit	806.361.760	5 Unit	1.181.836.760	5 Unit	6.407.283.800	UPTD Balai Budidaya Ikan (BBI)	Kabupaten Bantul Kecamatan Sewon Kecamatan Jetis Kecamatan Pandak Kecamatan Pundong Kecamatan Sanden Desa Panggungharjo Desa Sumberagung Desa Wijirejo Desa Srihardono Desa Sriharjo Desa Caturharjo
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tercapainya penurunan jumlah pelanggaran aturan															Bidang Pengolahan Pemasaran dan Pengawasan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Jumlah pelanggaran aturan tahun n dikurangi jumlah pelanggaran aturan tahun n-1 dibagi jumlah pelanggaran tahun n-1 dikalikan 100%	5 persen	5 persen	3.900.000	5 persen	3.900.000	5 persen	53.900.000	5 persen	53.900.000	5 persen	79.900.000	5 persen	195.500.000	Bidang Pengolahan Pemasaran dan Pengawasan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Tercapainya penurunan jumlah pelanggaran aturan															Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode					
							TAHUN 2021	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota																		Semua Desa	
				Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Jumlah pelanggaran aturan tahun n dikurangi jumlah pelanggaran aturan tahun n-1 dibagi jumlah pelanggaran tahun n-1 dikalikan 100%	5 persen	5 persen	3.900.000													Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan																	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan	Jumlah pengawasan dan pembinaan yang terlaksana dibagi jumlah pengawasan dan pembinaan yang direncanakan dikalikan 100%	100 persen	100 persen	3.900.000	100 persen	3.900.000	100 persen	53.900.000	100 persen	53.900.000	100 persen	79.900.000	100 persen	195.500.000			Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Laporan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)		12 dokumen	12 dokumen	2.000.000													Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Pelaksanaan Pengawasan cara penangkapan ikan yang baik		1 lokasi	1 lokasi															
				peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan tangkap		20 Orang	20 Orang															
		3.25.05.2	Pengawasan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	1	67.000.000	5	165.000.000	Seksi	Kabupaten		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode			
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		.01.01	Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di Kelompok	Jumlah kelompok yang dilaksanakan Pengawasan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	5 kelompok	5 kelompok	1.900.000											Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang embudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang embudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1.900.000	1 dokumen	1.900.000	1 dokumen	6.900.000	1 dokumen	6.900.000	1 rekomendasi	12.900.000	5 dokumen	30.500.000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Terpenuhinya persentase produksi perikanan yang diolah															Bidang Pengolahan Pemasaran dan Pengawasan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Persentase produksi perikanan yang diolah	Jumlah hasil produksi perikanan yang diolah dibagi jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dikalikan 100%	2 persen	2 persen	42.900.000	2 persen	162.900.000	2 persen	127.900.000	5 persen	156.900.000	5 persen	306.950.000	5 persen	797.550.000	Bidang Pengolahan Pemasaran dan Pengawasan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terdapatnya usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha															Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode	
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	Jumlah usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	2 Unit	2 Unit	1.050.000	4 Unit	71.050.000	6 Unit	5.050.000	8 Unit	5.050.000	10 Unit	5.050.000	10 Unit	87.250.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan	jumlah Dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan	1 dokumen	1 dokumen	1.050.000											Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 dokumen	1 dokumen	1.050.000	2 dokumen	71.050.000	1 dokumen	5.050.000	1 dokumen	5.050.000	1 dokumen	5.050.000	6 dokumen	87.250.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terdapatnya pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan															Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Jumlah pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	5 Unit	5 Unit	24.950.000	6 Unit	24.950.000	7 Unit	44.950.000	8 Unit	69.950.000	10 Unit	145.000.000	10 Unit	309.800.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan	Jumlah peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan	20 Orang	32 Orang	24.950.000											Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	5 unit usaha	5 unit usaha	24.950.000	5 unit usaha	24.950.000	8 unit usaha	44.950.000	10 unit usaha	69.950.000	15 unit usaha	145.000.000	43 unit usaha	309.800.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode		
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Skala Usaha dan Risiko	Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko																
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan																Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan	Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang bermitra dengan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	n/a	3 Orang	16.900.000	5 Orang	66.900.000	7 Orang	77.900.000	9 Orang	81.900.000	11 Orang	156.900.000	11 Orang	400.500.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a			100 ton	10.000.000	100 ton	10.000.000	100 ton	10.000.000	100 ton	10.000.000	400 ton	40.000.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	peserta promosi produk perikanan	Jumlah peserta promosi produk perikanan	20 pelaku usaha	20 pelaku usaha	16.900.000												Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	16.900.000	8 pelaku usaha	56.900.000	10 pelaku usaha	67.900.000	10 pelaku usaha	71.900.000	15 pelaku usaha	146.900.000	48 pelaku usaha	360.500.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM

Tabel 6.2 Program Prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	BBI			2.000.000.000			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Salah satu agenda pembangunan dunia yang menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan SDGs adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan dalam SDGs meliputi kemiskinan, kelaparan, kesehatan, Pendidikan, wanita, air, energi, ekonomi, infrastruktur, kesenjangan, komunitas, konsumsi, iklim, lautan yang berkesinambungan, ekosistem, institusi dan kemitraan.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A.	Indikator tujuan:								
	Rasio Gini	0,37	0,36	0,35	0,325	0,32	0,31	0,31	
B.	Indikator sasaran:								
	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,65	
C.	Indikator program:								
	(Kalurahan Bahari yang direvitalisasi)	n/a	0	20 persen	60 persen	80 persen	100 persen	100 persen	
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								
	Persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan	n/a	0	20 persen	60 persen	80 persen	100 persen	100 persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	(Produksi perikanan tangkap)	829 ton	829 ton	831 ton	833 ton	835 ton	837 ton	837 ton	
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								
	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	50 persen	50 persen	50 persen	52 persen	54 persen	58 persen	58 persen	
	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	25 persen	
	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Persentase Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Diterbitkan	n/a			5 persen	8 persen	10 persen	10 persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Persentase Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Diterbitkan	n/a			5 persen	8 persen	10 persen	10 persen	
	Persentase Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi yang Didaftarkan	n/a			5 persen	8 persen	10 persen	10 persen	
	(Produksi perikanan budidaya)	12.740 ton	12.740 ton	12.805 ton	12.878 ton	12.959 ton	13.046 ton	13.046 ton	
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								
	Penerbitan rekomendasi usaha perikanan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	
	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	140 Pembudidaya	142 Pembudidaya	144 Pembudidaya	146 Pembudidaya	148 Pembudidaya	150 Pembudidaya	150 Pembudidaya	
	Peningkatan produksi perikanan budidaya	0,5 persen	0,5 persen	0,75 persen	1 persen	1,25 persen	1,5 persen	1,5 persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	0,3 persen	0,35 persen	0,4 persen	0,45 persen	0,5 persen	0,55 persen	0,55 persen	
	(Penurunan jumlah pelanggaran aturan)	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								
	Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	(Persentase produksi perikanan yang diolah)	2 persen	2 persen	2 persen	2 persen	5 persen	5 persen	5 persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								
	Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	2 unit	2 unit	4 unit	6 unit	8 unit	10 unit	10 unit	
	Pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	5 unit	5 unit	6 unit	7 unit	8 unit	10 unit	10 unit	
	Nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan	n/a	3 orang	5 orang	7orang	9 orang	11 orang	11 orang	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	Jawatan pelayanan umum
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100 persen	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	jawatan Praja
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	90 angka	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	jawatan Pelayanan
3	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	86 persen	86 persen	Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 Persen	80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	86 persen	86 persen	Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial
	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	86 persen	86 persen	Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial
4	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	87 persen	87 persen	88 persen	89 persen	90 persen	91 persen	91 persen	Jawatan Keamanan
	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90 Persen	87 persen	88 persen	89 persen	90 persen	91 persen	91 persen	Jawatan Keamanan
5	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	90 persen	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	Jawatan Praja

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Direktur,

.....



BUPATI BANTUL,
ABDUL HALIM MUSLIH